



NOTA KEUANGAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

BAB I	PENDAHULUAN	
	Umum	1
	Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan	4
	Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan.....	4
	Sistematika Penulisan Penyusunan Nota Keuangan.....	8
BAB II	KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN	
	Kondisi Umum Anggaran Pendapatan	10
	Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan.....	14
	Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2003	16
BAB III	KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA	
	Kondisi Umum Anggaran Belanja.....	31
	Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Belanja	34
	Alokasi Belanja Tahun 2003.....	36
BAB IV	KONDISI DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN	
	Kondisi Umum Pembiayaan	43
	Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan	43
	Srategi Pembiayaan Daerah	44
BAB V	PROGRAM DAN KEGIATAN	48
BAB VI	PENUTUP	72

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2000 – 2003	11
Tabel 2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2002 – 2003	16
Tabel 3	Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2002 – 2003	17
Tabel 4	Alokasi Dana Perimbangan Tahun 2002 – 2003	27
Tabel 5	Perkembangan jumlah Belanja Tahun 2000 – 2003	32
Tabel 6	Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2003	37
Tabel 7	Alokasi Belanja Aparatur Daerah	38
Tabel 8	Alokasi Belanja Pelayanan Publik	40
Tabel 9	Pembiayaan Daerah Tahun 2003	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perkembangan Kenaikan Pendapatan Tahun 2000 – 2002 .	12
Grafik 2	Perkembangan Proporsi komponen Pendapatan Tahun 2000 – 2002	13
Grafik 3	Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2003	17
Grafik 4	Perkembangan Prosentase Belanja Tahun 2000 – 2002	33

BAB I

PENDAHULUAN

UMUM

Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 merupakan pelaksanaan manifestasi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa "*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*".

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta kemudian dengan dijabarkan secara teknis melalui Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka bentuk dan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003 telah

Pengajuan RAPBD 2003 merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Bentuk dan struktur RAPBD 2003 menggunakan Sistem Anggaran Kinerja.

mengimplementasikan Sistem Anggaran Kinerja.

Sistem Anggaran Kinerja lahir sebagai bentuk dari reformasi pembangunan nasional yang merupakan komitmen Pemerintah untuk melakukan reformasi disegala bidang. Perubahan tersebut akan merombak secara signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk bidang keuangan daerah.

Dengan demikian diharapkan terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Dalam kaitan itu, Sistem Anggaran Kinerja diharapkan mampu menciptakan nuansa manajemen keuangan daerah yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.

Untuk itu sebagai bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk selalu mengikuti perubahan yang konstruktif dan positif, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 merupakan RAPBD pertama yang menggunakan Sistem Anggaran Kinerja.

Sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2003, didasarkan pada Rencana Strategik Tahun 2003, dengan mengacu pada 3 (tiga) tujuan utama yakni (i) terwujudnya peningkatan keuangan daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengoptimalkan penggalan dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah (ii)

Sistem Anggaran Kinerja merupakan salah satu bentuk reformasi pembangunan nasional

Tujuan diberlakukannya Sistem anggaran Kinerja adalah meningkatkan transparan dan akuntabilitas dibidang keuangan.

RAPBD 2003 merupakan RAPBD pertama yang melaksanakan sistem anggaran kinerja.

RAPBD 2003 mengacu pada Renstra 2003 yang memiliki 3 tujuan utama yakni peningkatan keuangan daerah, peningkatan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, perkembangan IPTEK dan deregulasi Peraturan Perundang-Undangan Dunia usaha serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (iii) terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan memanfaatkan terbukanya Pasar Global, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta pesatnya perkembangan IPTEK.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro (asumsi dasar) baik secara nasional maupun melihat perkembangan perekonomian masyarakat lokal yakni Kabupaten Lamongan. Sebagai asumsi makro yang mendasarinya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan laju inflansi. Dalam Tahun 2003 prospek perkembangan ekonomi diproyeksikan sebesar 4 % yang berarti sama dengan proyeksi nasional, dan laju inflansi sekitar 9 persen yang berarti sama dengan rata-rata laju inflansi nasional Tahun 2002. Asumsi dasar tersebut akan mempengaruhi tingkat pencapaian proyeksi Pendapatan Daerah dan kebutuhan daerah yang sudah dirancang didalam APBD Tahun Anggaran 2003.

*Asumsi dasar RAPBD
2003 : pertumbuhan
ekonomi 4 %, dan laju
inflansi 9 %.*

Asumsi tersebut didukung salah satu unsur pokok pertumbuhan ekonomi yaitu kestabilan politik semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak dipungkiri pula bahwa dengan penyelesaian berbagai permasalahan nasional seperti konflik Aceh, termasuk juga

dengan hampir terselesainya pengungkapan Peristiwa Bom Bali akan semakin menumbuhkan kepercayaan internasional dalam menanamkan investasinya, sehingga mempengaruhi secara langsung perekonomian nasional, yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Dengan kondisi perekonomian tersebut adalah merupakan harapan besar bagi kita akan mendorong perekonomian daerah semakin terealisasi.

Dengan perkiraan asumsi tersebut diatas, maka Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 346.125.023.600,00, sedangkan Belanja Daerah diperkirakan membutuhkan alokasi sebesar Rp. 353.711.732.500,00 sehingga defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp. 7.586.708.900,00. Defisit tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan pembiayaan dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu sebesar Rp. 26.200.000.000,00

*Defisit RAPBD 2003
sebesar Rp7.586.708.900*

MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN NOTA KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan ini adalah untuk :

*Maksud dan tujuan
penulisan Nota
Keuangan*

1. Memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang tertuang dalam Rancangan APBD Tahun 2003, serta kondisi yang melatarbelakangi dialokasikannya dalam Rancangan APBD.
2. Menjabarkan terhadap perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi yang terkandung dalam

rencana strategis Kabupaten Lamongan.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN

Didalam penyusunan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2003 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

*Landasan hukum
penyusunan Nota
Keuangan RAPBD
2003*

- Negara Tahun 2839) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 2024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasab Keuangan

Daerah ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

SISTEMATIKA PENULISAN NOTA KEUANGAN

Penyusunan Nota Keuangan merupakan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan garis-garis kebijakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2003. Adapun kerangka penulisannya disusun sebagai berikut :

Nota Keuangan merupakan penjelasan kualitatif dan kuantitatif

1. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang kondisi yang terjadi ditengah penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2003 dimana sebagai acuan dasarnya adalah Rencana Strategik Tahun 2003, dan melihat asumsi dasar perkiraan perkembangan ekonomi diTahun mendatang sehingga dapat tersusunnya RAPBD Tahun Anggaran 2003.
2. Bab II menjelaskan mengenai kondisi perkembangan pendapatan selama 3 Tahun terakhir dari Tahun 2000, 2001 dan 2002. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan daerah dan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD selama periode anggaran 2000 sampai dengan 2002. Pada Bab

Bab. I menjelaskan latarbelakang penyusunan RAPBD 2003

Bab II menjelaskan mengenai perkembangan pendapatan dan target dan kebijakan pendapatan RAPBD 2003

ini juga diuraikan kebijakan pendapatan daerah pada RAPBD Tahun 2003, sebab – sebab kenaikan dan penjelasan secara kuantitatif dari target yang diproyeksikan.

3. Bab III menjelaskan mengenai kondisi perkembangan belanja selama 3 Tahun terakhir dari Tahun 2000, 2001 dan 2002. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan umum belanja daerah dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD selama periode anggaran 2000 sampai dengan 2002. Pada bab ini juga diuraikan kebijakan belanja daerah pada RAPBD Tahun 2003, serta latarbelakang pengalokasian belanja daerah.

Bab III menjelaskan mengenai perkembangan belanja dan alokasi dan kebijakan belanja pada RAPBD 2003

4. Bab IV menjelaskan mengenai perkembangan umum dan arah kebijakan pembiayaan daerah sebagai implikasi dari target Pendapatan yang ditetapkan dan alokasi kebutuhan belanja daerah.

Bab IV menjelaskan mengenai kebijakan pembiayaan daerah

5. Bab V memaparkan tentang program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk memperoleh tujuan dari sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Kabupaten Lamongan..

Bab V menjelaskan mengenai program dan kegiatan pemerintah

6. Bab VI merupakan penutup dari keseluruhan uraian

Bab VI Penutup

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi otonomi yang semakin luas dan bertanggungjawab. Selain daripada itu komitmen pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah dibuktikan dengan melalui pemberian kewenangan bidang-bidang pemerintahan yang semakin luas. Seiring dengan besarnya kewenangan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan urusan di bidang keuangan yang menjadi urusan pemerintah pusat dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan menjadi hak daerah untuk mengelolanya.

Implikasi implementasi otonomi daerah dibidang keuangan dilakukan dengan melalui desentralisasi fiskal

Implikasi dengan diterapkannya desentralisasi fiskal mempengaruhi semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengelola dan memberdayakan kapasitas fiskalnya sesuai dengan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah. Hal ini juga seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mempengaruhi peningkatan kapasitas keuangan secara keseluruhan.

Desentralisasi keuangan meningkatkan kapasitas pendapatan daerah

Dari Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat perkembangan besarnya Pendapatan Daerah Tahun 2000 – 2002

Tabel 1
Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2000 – 2002
(dalam ribuan)

Uraian	2000	2001	2002
SILPA Tahun Lalu	2.828.969	6.111.848	24.603.199
PAD	6.047.271,2	14.778.467	21.085.005,7
Dana Perimbangan (Dana dari Pemerintah Pusat)	114.210.470	257.882.023	279.841.091,7
Lain-Lain Penerimaan Yang sah	0	2.423.450	9.461.000
Jumlah	123.086.710,2	281.195.788	334.990.296,4

Keterangan :

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu didalam struktur Pendapatan Tahun 2003 masuk dalam komponen pembiayaan.

Dari tabel diatas tampak bahwa perkembangan pendapatan daerah setiap Tahunnya mengalami peningkatan yang dinamis setiap Tahunnya. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada perkembangan Pendapatan di Tahun 2001. Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2000 terjadi perubahan Tahun Anggaran sehingga hanya berjalan selama 9 bulan saja. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan Tahun 2001 mengalami lonjakan volume pendapatan yang cukup besar. Namun hal ini juga terjadi apabila dibandingkan secara interpolasi (perbandingan melalui periode waktu yang sama) maka perkembangan pendapatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2001 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni sebesar 71,34 %.

Perkembangan Pendapatan yang cukup tinggi dialami di Tahun 2001 yakni sebesar 71,34 %

Hal yang perlu dicermati pula bahwa kenaikan tersebut juga disebabkan adanya perubahan yang cukup mendasar pada struktur pendapatan didalam APBD. Masuknya Skeme Dana

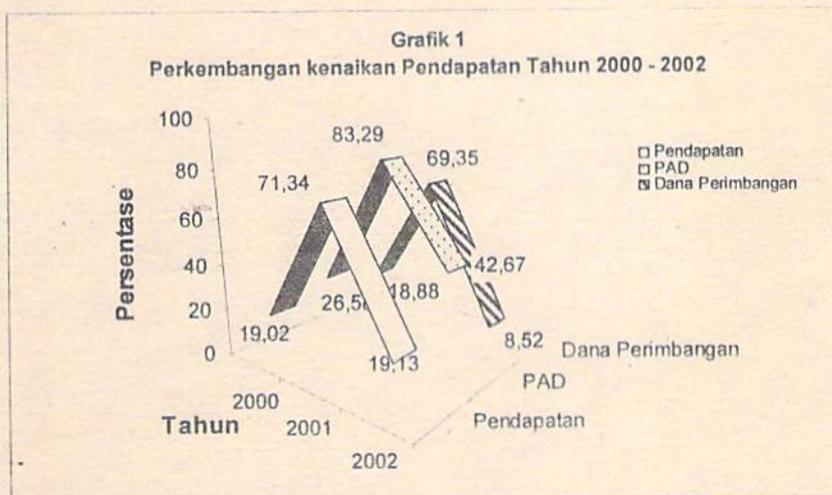
Tahun 2001 terjadi perubahan struktur Pendapatan didalam APBD.

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kenaikan persentase hasil pajak dan sumberdaya alam merupakan wujud dilaksanakan desentralisasi fiskal.

Tahun 2002 Pendapatan Daerah juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni sebesar 19,13 %. Kenaikan tersebut menunjukkan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah karena hampir terselesaikannya restrukturisasi pembagian kewenangan khususnya dibidang Keuangan Daerah.

Tahun 2002 Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar 19,13 %

Secara rinci prosentase perkembangan kenaikan Pendapatan Tahun 2000 – 2002 tercantum pada **Grafik 1**.



Keterangan :

Perkembangan prosentase antara Tahun 2000 – 2001 dilakukan interpolasi sebab Tahun 2000 anggaran hanya berjalan 9 bulan

Di sisi Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan 3 Tahun terakhir juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di Tahun 2001 Pendapatan Asli Daerah secara interpolasi mengalami lonjakan yang cukup tinggi yakni sebesar 83,29 % apabila dibandingkan pada periode yang sama di Tahun 2000. Hal utama yang menjadi unsur kenaikan terjadi seiring dengan adanya kebijakan pemberdayaan organisasi

Tahun 2001 PAD mengalami kenaikan sebesar 83,29 %.

pemerintahan yang diarahkan untuk mewirausahakan melalui kontribusi penerimaan usaha dinas. Hal lain yang cukup berperan terhadap kenaikan tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal disisi lain Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola dan memberdayakan uang yang mengendap di Kas Daerah melalui Deposito.

Sedangkan di Tahun 2002 kenaikan PAD juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni sebesar 42,67 %. Kenaikan ini juga dipicu dari semakin meningkatnya penerimaan dari non pajak dan non retribusi. Hal ini terutama berasal dari penerimaan usaha semakin dimantapkan, dan kontribusi BUMD akan lebih diberikan stimulasi untuk lebih berkontribusi. Namun demikian perkembangan pajak dan retribusi juga menunjukkan pertumbuhan yang mantap khususnya retribusi daerah, sehingga hal ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang.

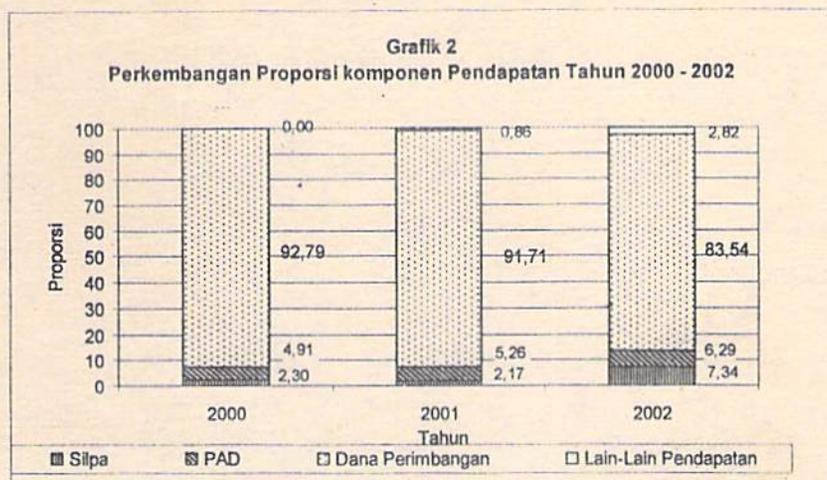
Di Tahun 2000 implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 belum dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga desentralisasi fiskal belum dilaksanakan sepenuhnya. Walaupun secara proporsi masih merupakan unsur terbesar dari keseluruhan APBD, namun demikian penggunaan dana tersebut masih diarahkan penggunaanya oleh Pemerintah Pusat. Perkembangan dana tersebut di Tahun 2000 sebesar 18,88 %.

Sedangkan apabila dilihat perkembangan prosentase kenaikan pada PAD juga diimbangi dengan peranan PAD

Tahun 2002 PAD mengalami kenaikan sebesar 42,67 %

DiTahun 2000 desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dilaksanakan.

terhadap Pendapatan Daerah. Proporsi PAD setiap Tahun meningkat secara signifikan sebagaimana **Grafik 2** dibawah ini :



Dari Grafik 2 dapat tergambar adanya elastisitas antara PAD dan Dana Perimbangan. Hal ini nampak dengan semakin meningkatnya Dana Perimbangan mempengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan PAD, sehingga proporsi PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memberikan stimulasi kepada usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD.

Adanya elastisitas antara PAD dan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah. dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah di Tahun 2001 terjadi kenaikan yang besar mencapai sebesar 69,35 % atau hampir 90 % dari seluruh volume APBD. Hal ini cukup logis karena proporsi PAD yang masih kecil dibandingkan dengan seluruh Pendapatan Daerah yang ada. Oleh karena itu proporsi PAD ini akan lebih bisa dipacu di Tahun-Tahun mendatang.

Dana Perimbangan Tahun 2001 naik sebesar 69,35 %

DiTahun 2002 seiring dengan selesainya restrukturisasi kewenangan dan reorganisasi diTahun 2001, membawa implikasi terhadap perkembangan Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar 8,52 %.

Dana Perimbangan Tahun 2002 naik sebesar 8,52 %.

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi, stimulasi peningkatan ekonomi melalui kebijakan fiskal menjadi semakin penting, terutama dalam mendukung langkah-langkah penyesuaian ekonomi, serta mendorong program pemulihan ekonomi daerah baik yang berbasis di Perkotaan maupun Pedesaan disisi lain juga perlu adanya pembenahan disektor pelayanan masyarakat. Peran tersebut terasa berat, mengingat pada saat hampir bersamaan hampir seluruh bidang memerlukan tambahan dukungan dana, padahal basis Pendapatan Daerah relatif tetap.

Permasalahan pendapatan yang dihadapi di Tahun 2003

Oleh karena itu, sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk selalu meningkatkan kapasitas keuangan daerah, serta perkembangan ekonomi yang menunjukkan semakin kondusif maka upaya Pendapatan Daerah diTahun 2003 diharapkan dapat semakin meningkat. Oleh karena itu didalam Tahun 2003, Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Arah dan kebijakan umum Pendapatan Daerah

1. Menciptakan kondisi fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan mendorong peningkatan

Menciptakan fiscal sustainability

pendapatan daerah lebih besar daripada peningkatan belanja daerah. Pencapaian ini harus dilakukan secara bersamaan baik pada sisi Pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

2. Proporsi PAD terhadap seluruh Pendapatan Daerah akan lebih didorong untuk semakin meningkat dengan menggali sumber-sumber penerimaan dan melakukan intensifikasi sumber-sumber penerimaan baik melalui perbaikan pemungutan, perbaikan fasilitas pelayanan dan pemberdayaan Perusahaan daerah.

Meningkatkan proporsi PAD

3. Diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap sumber penerimaan dari Dana Perimbangan agar dana yang dialokasikan sesuai dengan kondisi dan indikator – indikator di Kabupaten Lamongan

Pengkajian yang mendalam terhadap Dana Perimbangan

ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Berdasarkan kondisi objektif dan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2003 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 346.125.023.600,- yang berarti mengalami peningkatan pada periode yang sama di Tahun 2002 sebesar 11,51 %. Adapun gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2** dibawah ini :

Target Pendapatan Daerah Tahun 2003 naik sebesar 11,51 %.

Tabel 2
Target Pendapatan Daerah Tahun 2002 - 2003

Uraian	2002	2003
1. PAD	21.085.005.700	26.097.230.600
2. Dana Perimbangan	287.042.091.730	296.135.203.000
3. Lain-Lain Penerimaan Yang sah	2.260.000.000	23.892.590.000
Jumlah	310.387.097.430	346.125.023.600

Dari Tabel 2 di atas secara grafik dapat digambarkan bahwa proporsi PAD pada Tahun 2003 adalah sebesar 7,54 % terhadap seluruh pendapatan daerah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan apabila dibandingkan proporsi PAD pada Tahun 2002 yang hanya sebesar 6,79 % dari seluruh pendapatan daerah.



Selanjutnya masing-masing komponen tersebut diuraikan penjelasan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dari komponen Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 26.097.230.600,00 atau meningkat sebesar 23,77 % bila dibandingkan pada Tahun 2002. Kenaikan tersebut akan lebih didorong lagi untuk memperkecil proporsi terhadap komponen Dana Perimbangan yang masih dirasakan kecil.

PAD Tahun 2003 meningkat sebesar 23,77 %.

Untuk melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3
Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2002 – 2003

Uraian	2002	2003
1. Pajak Daerah	4.840.000.000	5.589.000.000
2. Retribusi Daerah	7.044.341.500	7.305.414.600
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	325.500.000	633.000.000
4. Lain-lain PAD yang sah	8.875.164.200	12.569.816.000
Jumlah	21.085.005.700	26.097.230.000

Dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 5.589.000.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar 15,48 %. Dari masing-masing komponen Pajak Daerah tersebut, diuraikan secara rinci sebagai berikut :

Target Pajak Daerah naik sebesar 15,48 %

Pajak Hotel diproyeksikan sebesar Rp. 8.040.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar 4,69 %. Penerimaan Pajak Hotel yang masih relatif kecil tersebut lebih disebabkan masih sedikitnya obyek pajak yang ada.

Target Pajak Hotel naik sebesar 4,69 %

Pajak Restoran diperkirakan mencapai sebesar Rp. 22.460.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar 22,60 %. Untuk memeuhi target tersebut akan diupayakan melalui intensifikasi pemungutan kepada pengusaha restoran maupun secara aktif melakukan pemungutan warung dan kaki lima pada kawasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Target Pajak Restoran naik sebesar 22,60 %.

Pajak Hiburan diperkirakan mencapai sebesar Rp. 62.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar 27,06 %. Penurunan ini karena diperkirakan menurunnya frekwensi agenda hiburan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan Tahun 2002.

Target Pajak Hiburan turun sebesar 27,06 %

Pajak Reklame diperkirakan mencapai sebesar Rp. 96.500.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar 5,46 %. Kenaikan tersebut akan didorong melalui kemudahan pelayanan kepada para investor untuk memasang reklame sebagai implikasi dari hampir selesainya ruas jalan Gresik – Widang.

Target Pajak Reklame naik sebesar 5,46 %

Sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat melakukan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), maka untuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp. 5.250.000.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar 16,67 %.

Target Pajak Penerangan Jalan Umum naik sebesar

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 11,11 %. Kenaikan tersebut ditunjang oleh semakin membaiknya kesadaran para penambang untuk tertib pungut sebagai dampak dari sosialisasi yang telah diadakan.

Target Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C naik sebesar 11,11 %

Pajak Sarang Burung diperkirakan mencapai sebesar Rp. 50.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 5,26 %. Kenaikan ini akan lebih ditingkatkan melalui pendataan obyek pajak dan sosialisasi kepada pemilik sarang burung.

Target Pajak Sarang Burung naik sebesar 5,26 %

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah diperkirakan sebesar Rp. 7.305.414.600,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 3,71 %. Dari masing-masing komponen Retribusi, diuraikan secara rinci sebagai berikut :

*Target Retribusi Daerah
naik sebesar 3,71 %*

Dibidang pelayanan Kesehatan, Pemerintah senantiasa meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas-Puskesmas. Karena dari beberapa kajian yang dilakukan oleh RSUD Dr.Soegiri dan Dinas Kesehatan memberi kesimpulan bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mampu meningkatkan kontribusi penerimaan. Retribusi Kesehatan diperkirakan dapat mencapai sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 18,48 %.

*Target Retribusi
Pelayanan Kesehatan
naik sebesar 18,48 %*

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan diperkirakan sebesar Rp. 90.000.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar 2,27 %. Untuk mencapai target tersebut akan diupayakan melalui intensifikasi pemungutan sekaligus melakukan peningkatan kualitas kebersihan di perkotaan.

*Target Retribusi
Persampahan / Kebersihan
meningkat sebesar
2,27 %.*

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk diperkirakan sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar 94,29 %. Penurunan ini karena pada Tahun 2003 tidak dilakukan KTP massal, dengan demikian hanya dilakukan pelayanan secara reguler saja.

*Target Retribusi
Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk
turun sebesar 94,29 %.*

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil diperkirakan sebesar Rp. 230.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 4,55 %. Target kenaikan tersebut sesuai dengan proyeksi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lamongan dan menjaring potensi terhadap penduduk yang masih belum memiliki akte.

*Target Retribusi
Penggantian Biaya Cetak
Akte Catatan Sipil naik
sebesar 4,55 %.*

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan diperkirakan mencapai sebesar Rp. 347.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan 1,46 %. Sebagai upaya untuk meningkatkan jenis penerimaan ini akan dilakukan obyek-obyek baru sebagai lapangan retribusi. Hal ini akan selaras dengan pertumbuhan investasi terutama sektor perdagangan dan jasa dipertanian sehingga mampu menambah obyek perpajakan.

*Target Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan naik sebesar
1,46 %.*

Retribusi Pelayanan Pasar diperkirakan mencapai sebesar Rp.1.144.812.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,09 %. Kenaikan tersebut akan dicapai melalui intensifikasi pemungutan, seiring dengan semakin membaiknya kualitas sarana dan prasarana Pasar Pemerintah.

*Target Retribusi Pelaya-
nan Pasar naik sebesar
1,09 %.*

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni sebesar 13,64 %. Pencapaian target tersebut diharapkan dari dampak adanya peningkatan kualitas fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

*Target retribusi Peh-
gujian Kendaraan
Bermotor naik sebesar
13,64 %.*

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diperkirakan sebesar Rp. 8.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 6,25 %. Upaya pencapaian target penerimaan ini dilakukan melalui pemeriksaan alat

*Target Retribusi Peme-
rksaan Alat Pemadam
Kebakaran naik sebesar
6,25 %.*

pemadam kebakaran yang semakin intensif di Kantor Pemerintahan maupun swasta disamping untuk mencegah lebih dini terjadinya kebakaran.

Retribusi Jasa Usaha pemakaian Kekayaan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 625.051.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 9,40 %. Kenaikan tersebut akan ditempuh dengan melalui kenaikan sewa tarif juga dipengaruhi bertambahnya pelayanan seperti penambahan truk dan alat – alat berat.

Target Retribusi Jasa usaha Pemakaian Kekayaan Daerah naik sebesar 9,40 %.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan diperkirakan mencapai sebesar Rp. 500.500.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 3,20 %. Kenaikan tersebut dicapai melalui perbaikan sistem pemungutan dan semakin membaiknya fasilitas tempat pelelangan.

Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan naik sebesar 3,20 %.

Retribusi Jasa Usaha Terminal direncanakan sebesar Rp. 118.728.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,26 %. Sebagai upaya untuk memenuhi target tersebut akan dilakukan intensifikasi pemungutan dan secara aktif melakukan pengawasan agar kendaraan umum dapat tertib pungut.

Target Retribusi Jasa Usaha Terminal naik sebesar 1,26 %.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus diperkirakan mencapai sebesar Rp. 107.323.600,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar 3,61 %. Penurunan ini disebabkan adanya peninjauan kembali terhadap kontrak jasa Usaha Tempat Parkir Khusus di Pangkalan Brondong.

Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus turun sebesar 3,61 %.

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan diperkirakan sebesar Rp. 45.000.000,00 yang berarti mengalami

Target Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong

kenaikan sebesar 6,51 %. Kenaikan ini akan dilakukan baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan karena semakin terbatasnya obyek retribusi ini.

Hewan naik sebesar 6,51 %.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi diperkirakan mampu mencapai sebesar Rp. 970.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 6,01 %. Proyeksi kenaikan ini diperkirakan dapat tercapai seiring dengan laju peningkatan ekonomi masyarakat disisi lain juga memperhatikan laju perkembangan kunjungan wisata di Kabupaten Lamongan. Demikian juga usaha pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan perbaikan fasilitas dan pengembangan wisata yang semakin menunjukkan perkembangan.

Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi naik sebesar 6,01 %.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,00 yang berarti tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Tahun 2002. Penetapan target penerimaan ini melihat faktor kondisi laju pembangunan rumah khususnya pada perumahan yang diperkirakan masih sama dengan tahun lalu.

Target Retribusi IMB tetap

Retribusi Izin gangguan diperkirakan dapat mncapai sebesar Rp. 55.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 17,02 %. Kenaikan ini akan dicapai melalui pemeriksaan dan pengawasan langsung ke lapangan terhadap sektor industri dan inventarisasi perusahaan yang sudah habis masa berlaku Sertifikat Izin Gangguannya.

Target Retribusi Izin Gangguan naik sebesar 17,02.

Retribusi Izin Trayek diperkirakan sebesar Rp. 16.500.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 3,13 %. Masih rendahnya investor dalam menanamkan modalnya untuk mendukung transportasi di Kabupaten Lamongan membuat besarnya Izin Trayek ini masih kecil begitu juga kenaikannya, walaupun sarana jalan meningkat kualitasnya, oleh karena akan dilakukan stimulasi dan regulasi untuk merangsang para investor untuk menanamkan modalnya dibidang transportasi di Kabupaten Lamongan disamping juga untuk meningkatkan laju mobilisasi masyarakat pedesaan untuk memperlancar akses ekonomi.

Target Retribusi Izin Trayek naik sebesar 3,13 %.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Secara keseluruhan dari jenis penerimaan ini diperkirakan mencapai sebesar Rp. 633.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan yang cukup besar 94,47 % yang semuanya berasal dari Bagi hasil perusahaan Milik Daerah.. Untuk mengetahui kenaikan tersebut dapat dilihat pada masing-masing komponen penerimaannya, yakni :

Target Hasil perusahaan Milik Daerah naik sebesar 94,47 %.

Dari PD Aneka Usaha Lamongan Jaya pada Tahun 2003 target kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan diperkirakan sebesar Rp. 90.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 48,76 %. Hal ini karena ditunjang kondisi perusahaan yang kian menunjukkan peningkatan kinerjanya dengan melakukan beberapa bidang usaha yang dilakukan dan bertambahnya portofolio yang dimiliki oleh Perusahaan tersebut.

PD Aneka Usaha lamongan Jaya targetnya naik sebesar 48,76 %.

Dari Lembaga Keuangan Bank, PD Bank Pasar diperkirakan mampu berkontribusi sebesar Rp. 393.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 48,30 %. Kenaikan ini menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin meningkat dengan melalui peningkatan pelayanan dan mampu dalam persaingan yang semakin kompetitif.

Kontribusi PD Bank Pasar naik sebesar 48,30 %.

Sedangkan dari BPD Jatim di Tahun 2003 ini mampu mencatatkan laba perusahaannya, sehingga dapat berkontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 150.000.000,00.

BPD Jatim Tahun 2003 berkontribusi sebesar Rp. 150.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen penerimaan ini di Tahun 2003 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 41,63 % yang diperkirakan dapat mncapai sebesar Rp. 12.569.816.000,00. untuk mngetahui kenaikan penerimaan ini dapat dilihat pada masing-masing komponennya, yakni :

Target Lain-Lain PAD naik sebesar 41,63 %.

Dari Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan diperkirakan mampu mencapai target sebesar Rp. 31.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 51,22 %. Untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang dipandang tidak digunakan lagi maupun tidak bermanfaat khususnya Kendaraan Dinas Roda Empat untuk dilakukan pelelangan sehingga berkontribusi terhadap Penerimaan Daerah.

Target Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan naik sebesar 51,22 %.

Untuk Penerimaan Jasa Giro diperkirakan mencapai

Target Penerimaan Jasa

sebesar Rp. 348.423.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 16,76 %. Kenaikan tersebut seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Giro naik sebesar 16,76 %.

Sumbangan Pihak Ketiga yang berasal dari Pelabuhan Rakyat (Pelra) ditargetkan sebesar Rp. 15.000.000,00 yang berarti tetap sebagaimana target Tahun 2002.

Target Sumbangan Pihak Ketiga tetap

Untuk Penerimaan Bunga Deposito diperkirakan mampu mencapai sebesar Rp. 6.566.575.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 54,09 %. Penerimaan dari jenis ini semakin menunjukkan peningkatan kontribusinya seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Target Penerimaan Bunga Deposito naik sebesar 54,09 %.

Penerimaan Usaha Dinas semakin dimantapkan dalam menunjang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dilakukan karena semakin terbatasnya sumber-sumber penerimaan yang ada. Dari penerimaan ini ditargetkan sebesar Rp. 5.013.498.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 32,51 %.

Target Penerimaan Usaha Dinas naik sebesar 32,51 %

Penerimaan Lain-Lain sebagian besar berasal dari angsuran kembali dari Kredit Pasar Desa. Dari keseluruhan jenis penerimaan ini diperkirakan mencapai sebesar Rp. 595.320.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 19,98 %.

Target Penerimaan lain-Lain naik sebesar 19,98 %.

2. DANA PERIMBANGAN

Didalam struktur APBD Tahun Anggaran 2003, struktur

Alokasi Dana Perimbangan naik sebesar

dana perimbangan mengalami perubahan yakni dengan masuknya bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Propinsi. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dari keseluruhan Pendapatan Daerah. Untuk Tahun 2003 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 296.135.203.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 3,17 %. Untuk mengetahui kenaikan tersebut dapat dilihat pada masing-masing komponen Dana Perimbangan yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4 :

Tabel 4
Alokasi Dana Perimbangan Tahun 2002 - 2003

Uraian	2002	2003
1. Bagi Hasil Pajak	14.976.468.000	14.796.195.000
2. Bagi hasil Bukan Pajak/SDA	2.154.623.730	1.852.439.000
3. Dana Alokasi Umum (DAU)	262.710.000.000	262.710.000.000
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	6.300.000.000
5. Bagi Hasil Pajak dan bantuan Keuangan dari Propinsi	7.201.000.000	10.476.569.000
Jumlah	287.042.091.730	296.135.203.000

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperkirakan mencapai sebesar Rp. 10.880.444.000,00 yang berarti tidak mengalami perubahan sebagaimana Tahun 2002.

Target PBB tetap

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diperkirakan sebesar Rp. 1.421.018.000,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar 11,26 %. Penurunan target ini dilakukan seiring dengan semakin menurunnya pula target pemerintah dari sektor pertanahan.

Target BPHTB turun sebesar 11,26 %.

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21) diperkirakan sebesar Rp. 2.494.733.000,00 yang

Target dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang

berarti tidak mengalami perubahan sebagaimana Tahun 2002. *Pribadi tetap.*

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari :

Provisi Sumber Daya Hutan dialokasikan sebesar Rp. 93.000.000,00 yang berarti tidak mengalami perubahan sebagaimana Tahun 2002. *Target PSDH tetap*

Iuran Eksplorasi dialokasikan sebesar Rp. 3.439.000,00 yang berarti ada kenaikan sebesar 0,01 %. Kenaikan merupakan dari pembulatan angka dari ketetapan Tahun 2002 sebesar Rp. 3.438.700,00. *Target Iuran Eksplorasi naik sebesar 0,01 %.*

Penerimaan Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar 46,92 %. Penurunan tersebut melihat perkembangan realisasi penerimaan pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan dan belum jelasnya plafond yang diterima dari Pemerintah Pusat. *Target Pungutan Pengusahaan hasil Perikanan turun sebesar 46,92 %*

Penerimaan dari sektor Pertambangan Minyak Bumi diperkirakan sebesar Rp. 490.000.000,00 yang berarti tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Tahun 2002. *Target penerimaan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi tetap.*

Penerimaan dari sektor Pertambangan Gas Alam diperkirakan sebesar Rp. 908.000.000,00 yang berarti tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Tahun 2002. *Target penerimaan dari sektor pertambangan Gas Alam tetap*

Pemberian Hak Atas Tanah Negara diperkirakan sebesar Rp. 8.000.000,00 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni sebesar 966,67 %. Kenaikan yang cukup besar ini disebabkan besarnya adanya penerimaan dari permohonan peralihan pertanahan negara di Kabupaten Lamongan.

Target Pemberian hak Atas tanah Negara naik sebesar 966,67 %.

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum didalam Tahun Anggaran 2003 ditetapkan sama dengan ketentuan Tahun 2002 yakni sebesar Rp. 262.710.000.000,00, sambil menunggu ketentuan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian upaya untuk meningkatkan Dana Alokasi Umum ini akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan karena dirasakan semakin meningkatnya kebutuhan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Target DAU tetap

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Tahun 2003, Dana Alokasi Khusus ditetapkan sebesar Rp. 6.300.000.000,00 yang diperuntukkan untuk bidang transportasi jalan, Kesehatan dan Pendidikan.

Tahun 2003 menerima alokasi DAK sebesar Rp. 6.300.000.000,00

e. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

Penerimaan ini secara keseluruhan berasal dari Bagi Hasil Propinsi yang terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor diperkirakan menerima alokasi sebesar Rp. 2.972.176.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 14,31 %. Kenaikan tersebut sebagai akibat dari naiknya proporsi pembagian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Target PKB naik sebesar 14,31 %.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperkirakan menerima alokasi sebesar 3.870.492.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 24,85 %. Kenaikan tersebut sebagai akibat dari naiknya proporsi pembagian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Target BBNKB naik sebesar 24,85 %.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diperkirakan menerima alokasi sebesar Rp. 3.204.608.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 154,33 %. Kenaikan ini selain ditunjang oleh rencana kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor, juga terdapat perubahan sebagai akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Target PBBKB naik sebesar 154,33 %.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah diperkirakan sebesar Rp. 429.293.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 78,13 %. Kenaikan tersebut sebagai akibat dari naiknya proporsi pembagian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Target Pajak ABT naik sebesar 78,13 %.

3: LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Dari penerimaan ini didalam struktur APBD Tahun Anggaran 2003 yang memuat 1 (satu) komponen yakni Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah dimana diperkirakan menerima alokasi sebesar Rp. 23.892.590.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 957,19 %. Kenaikan yang cukup besar tersebut merupakan alokasi untuk mengantisipasi rencana kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Fungsional Tenaga Pendidik.

Bantuan Dana Kontijensi / Penyeimbang dari Pemerintah naik sebesar 957,19 %.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA

KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA

Anggaran Belanja Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai bagian dari alat kebijakan fiskal, anggaran belanja dapat diterjemahkan sebagai dasar bagi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat khususnya yang tidak mungkin disediakan oleh swasta tanpa campur tangan pemerintah.

Anggaran Belanja Daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal di daerah

Di dalam Tahun Anggaran 2003, dalam rangka penyusunan APBD, maka struktur Belanja mengalami perubahan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun – Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Tahun 2003 Sistem Anggaran yang diberlakukan adalah sistem anggaran kinerja. Dengan sistem anggaran kinerja ini, Belanja dikategorikan secara tegas, baik untuk Belanja Administrasi Umum yang merupakan belanja tidak langsung, Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang merupakan belanja langsung dan digunakan untuk alokasi kegiatan yang tidak menambah aset serta Belanja Modal yang merupakan belanja langsung dan digunakan untuk alokasi kegiatan yang menambah aset.

Struktur Belanja di Tahun 2003 mengalami perubahan

Begitu juga terhadap sarannya terdefiniskan secara jelas yakni alokasi yang diperuntukkan untuk Bagian Belanja Aparatur dan Bagian Belanja Publik. Dengan struktur yang

Sasaran Belanja diarahkan untuk Belanja Aparatur dan Belanja Publik

semakin tegas tersebut memberikan kemudahan bagi pengontrolan dan pengawasan anggaran itu sendiri dan pengadministrasian akuntansi yang berbasis double entry. Demikian juga dengan identifikasi aset-aset daerah yang semakin mengelompok kedalam Belanja Modal sehingga semakin mudah untuk mendata dan menginventarisasi aset-aset daerah yang nantinya akan dilaporkan secara keseluruhan menjadi Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati

Dengan kondisi tersebut untuk mengartikulasikan kedalam perbandingan perkembangan belanja 3 (tiga) Tahun terakhir menjadi sulit, hal ini disebabkan karena adanya perubahan yang cukup drastis dimana Struktur Belanja di Tahun sebelumnya hanya terbagi menjadi 2 yakni : (i) Belanja Rutin dan (ii) Belanja Pembangunan dimana pemisahan perbedaan diantara kedua jenis belanja tersebut sangat samar dan tidak tegas.

Namun demikian untuk mengukur perkembangan kebutuhan belanja dapat diukur dengan melihat secara komprehensif (seluruh belanja) perkembangannya bukan dengan melihat secara terpilah-pilah dari jumlah perkembangan yang terjadi.

Sulit membandingkan kondisi belanja diTahun 2000 – 2002 dengan 2003

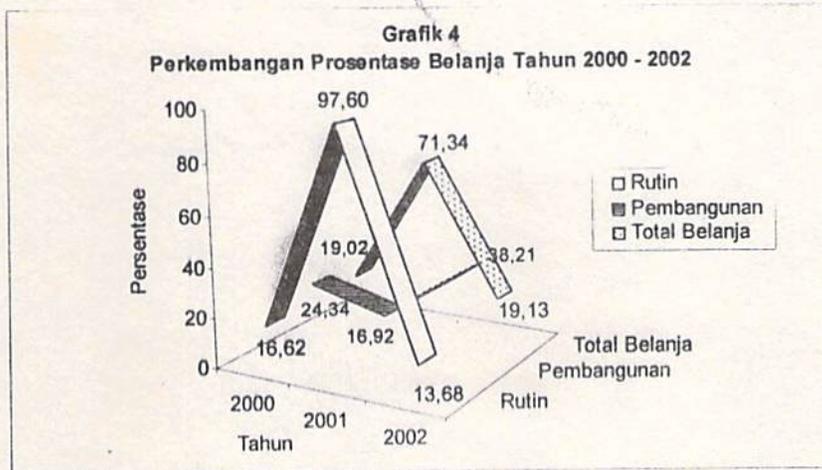
Untuk mengukur perkembangan belanja dapat diukur melalui penjumlahan keseluruhan belanja

Tabel 5
Perkembangan jumlah Belanja Tahun 2000 – 2002

Uraian	2000	2001	2002
Belanja Rutin	83.022.188,2	218.738.378	248.669.158,3
Belanja Pembangunan	40.064.540	62.457.410	86.321.138,1
Jumlah	123.086.728,2	281.195.788	334.990.296,4

Melihat data diatas, tampak bahwa ada pertumbuhan yang sangat drastis yang terjadi pada Tahun 2001. Dari **Grafik 3** juga menampakkan berkembang yang sangat fluktuatif. Rupanya perkembangan Belanja Tahun 2000 – 2002 diwarnai adanya perubahan dibidang keuangan yang sangat drastis pula yakni desentralisasi fiskal sebagai implikasi dari pelaksanaan kewenangan yang dimiliki.

Belanja Tahun 2000 – 2002 diwarnai dengan pelaksanaan kewenangan dalam rangka otoda



Keterangan :

Perkembangan prosentase antara Tahun 2000 – 2001 dilakukan interpolasi sebab Tahun 2000 anggaran hanya berjalan 9 bulan

Dengan luasnya kewenangan tersebut diikuti pula dengan restrukturisasi organisasi pemerintahan sehingga menambah peningkatan kebutuhan daerah karena bertambahnya jumlah pegawai, serta kebutuhan yang harus dicukupi. **Grafik 3** pada Tahun 2001 menunjukkan perkembangan prosentase total belanja naik secara drastis yakni 71,34 %.

Tahun 2001 akibat kewenangan yang diterima total belanja naik sebesar 71,34 %

Disamping penyerahan kewenangan tersebut, di Tahun 2001 juga terjadi penyesuaian Gaji PNS sebagai implikasi diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001, sehingga alokasi belanja Pegawai juga mengalami kenaikan yang sangat besar.

Lonjakan persentase kenaikan Belanja 2001 juga karena adanya penyesuaian gaji PNS

Setelah terjadi lonjakan perkembangan di Tahun 2001, maka Tahun 2002 dengan selesainya proses restrukturisasi organisasi Pemerintah di Kabupaten Lamongan, perkembangan Belanja menunjukkan peningkatan yang dinamis yakni sebesar 19,13 %.

Tahun 2002 belanja meningkat dinamis naik sebesar 19,13 %.

Namun perlu pula diperhatikan didalam Tahun 2002 adalah pertumbuhan Belanja Pembangunan yang menunjukkan perkembangan yang sangat tinggi yakni sebesar 38,21 % dibandingkan pada periode yang sama di Tahun 2001. hal ini disamping Belanja Rutin dilakukan efisien juga tidak ada kebijakan yang impresif untuk menaikkan Belanja Rutin sehingga difokuskan pada Belanja Pembangunan.

Tahun 2002 Belanja Pembangunan naik sebesar 38,21 %.

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA TAHUN ANGGARAN 2003

Sebagai perwujudan pelaksanaan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat dirasakan belum mencukupi dalam memenuhi keinginan masyarakat. Apalagi sangat dirasakan pula adanya persaingan yang sangat ketat diantara Pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonominya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten akan memacu perbaikan sarana dan prasarana pembangunan di sekitar masyarakat sekaligus mendorong ekonomi masyarakat secara simultan. Namun demikian untuk memenuhi kebutuhan tersebut dihadapkan pada kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Permasalahan terhadap Belanja yang dihadapi pada Tahun 2003

Bertitik tolak pada kondisi tersebut, Anggaran Belanja Tahun 2003 dirancang dengan lebih menfokuskan pada upaya untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, seraya memberikan stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya APBD yang sehat, sesuai dengan arah dan kebijakan fiskal yang digariskan dalam Rencana Strategis 2003. Dengan demikian disamping memperhitungkan kebutuhan anggaran yang benar-benar diperlukan, penyusunan anggaran belanja Tahun 2003 juga harus memperhatikan secara seksama kapasitas dan potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah, serta kemampuan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan anggaran yang ada, baik saat ini maupun dimasa mendatang tanpa menimbulkan dampak dan beban yang berlebihan (*excess burden*) pada APBD tahun-tahun mendatang

Anggaran Belanja difokuskan pada kesinambungan fiskal sesuai dengan yang digariskan dalam Resntra 2003.

Adapun dasar kebijakan umum dalam penyusunan Anggaran Belanja Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Arah dan kebijakan anggaran belanja

1. Sesuai dengan Rencana Strategis maka Anggaran Belanja Tahun 2003 akan diarahkan untuk : (i) terwujudnya peningkatan keuangan daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengoptimalkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah (ii) terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, perkembangan IPTEK dan deregulasi Peraturan Perundang-Undangan Dunia usaha serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (iii) terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan

Anggaran belanja diarahkan pada sasaran Renstra 2003

pelaksanaan otonomi daerah dan memanfaatkan terbukanya Pasar Global, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta pesatnya perkembangan IPTEK

2. Mengantisipasi kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan tunjangan fungsional tenaga pendidik di Tahun 2003.

Mengantisipasi kenaikan Gaji PNS dan Tunjangan Fungsional Tenaga Pendidik

3. Selalu menekankan pelaksanaan Anggaran Belanja yang efisien dan efektif

Belanja harus dilaksanakan secara efisien dan efektif

ALOKASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2003

Dari berbagai penelaahan kondisi dan arah serta kebijakan anggaran belanja, maka volume Belanja Tahun 2003 dialokasikan sebesar Rp. 353.711.732.500,00 atau secara total keseluruhan dibandingkan dengan Tahun 2002 naik sebesar 5,59 %.

Belanja Tahun 2003 dialokasikan sebesar Rp. 353.711.732.500,00

Kenaikan yang dirasakan cukup rendah tersebut timbul bukan karena berkurangnya volume kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan namun perlu dicermati bahwa, hal ini hanya disebabkan semata-mata adanya perbedaan struktur belanja dimana untuk Tahun 2003 ini beberapa alokasi yang ada masuk pada kebijakan pembiayaan daerah, seperti halnya dengan pengalokasian Dana Cadangan.

Rendahny kenaikan belanja disebabkan hanya masalah struktur belanja

Struktur Belanja di Tahun 2003 dengan Sistem Anggaran Kinerja ini memiliki struktur yang lebih tegas bila dibandingkan dengan Tahun 2002. Belanja dikategorikan menjadi Belanja Administrasi Umum yang merupakan belanja

Struktur Belanja Tahun 2003 dikategorikan secara tegas

tidak langsung, Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang merupakan belanja langsung dan digunakan untuk alokasi kegiatan yang bersifat non fisik dan tidak menambah aset serta Belanja Modal yang merupakan belanja langsung dan digunakan untuk alokasi kegiatan yang menambah aset.

Untuk melihat secara terperinci alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 dapat dilihat pada **Tabel 6** dibawah ini :

Tabel 6
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2003

Uraian Belanja	2003
A. APARATUR DAERAH	<u>96.356.702.000</u>
a. Belanja Administrasi Umum	75.496.147.000
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	7.592.240.000
c. Belanja Modal	13.268.315.000
B. PELAYANAN PUBLIK	<u>257.355.030.500</u>
a. Belanja Administrasi Umum	175.197.586.000
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	23.540.602.000
c. Belanja Modal	25.497.570.000
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	31.119.272.500
e. Belanja Tidak Tersangka	2.000.000.000
Jumlah	353.711.732.500

BELANJA APARATUR DAERAH

Pengelompokkan Belanja Aparatur Daerah ini ditujukan untuk penyediaan kebutuhan yang bersifat wajib dan kegiatan-kegiatan yang dirasakan langsung dan berdampak pada penyelenggara Aparatur Daerah.

Batasan Belanja Aparatur

Tahun 2003 Belanja Aparatur Daerah dialokasikan sebesar Rp. 96.356.702.000,00 atau secara proporsional apabila dibandingkan dengan keseluruhan total anggaran belanja mencapai sebesar 27,24 %.

*Secara Proposional
Belanja Aparatur sebesar
27,24 % dari total belanja*

Secara rinci alokasi Belanja Aparatur Daerah dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini :

TABEL 7
ALOKASI BELANJA APARATUR DAERAH

Uraian Belanja	2003
A. Belanja Administrasi Umum	75.496.147.000
1. Belanja Pegawai / Personalia	65.018.425.500
2. Belanja Barang dan Jasa	6.369.110.500
3. Belanja Perjalanan Dinas	1.094.830.000
4. Belanja Pemeliharaan	3.013.778.000
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	7.592.240.000
1. Belanja Pegawai / Personalia	2.180.833.500
2. Belanja Barang dan Jasa	4.805.429.500
3. Belanja Perjalanan Dinas	345.879.000
4. Belanja Pemeliharaan	260.098.000
C. Belanja Modal	13.268.315.000
Jumlah	96.356.702.000

Belanja Administrasi Umum pada Belanja Aparatur ini merupakan belanja wajib atau belanja yang tidak langsung berhubungan dengan program dan kegiatan dari suatu unit kerja yang sasarannya adalah aparatur daerah. Secara keseluruhan Belanja Administrasi Umum ini dialokasikan sebesar Rp. 75.496.147.000,00 yang sebagian besar berasal dari Belanja Pegawai / Personalia atau secara proposional sebesar 86,12 %. Dari keseluruhan belanja ini hal utama yang perlu dicermati adalah adanya kebijakan rencana kenaikan Gaji PNS dan Tunjangan Fungsional Tenaga Pendidik. Sedangkan untuk Belanja Administrasi Umum lainnya akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas rutin dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Aparatur Daerah.

BAU didominasi oleh Belanja Pegawai yang secara proposional sebesar 86,12 %.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja

Sifat BOP pada Kelompok Belanja Aparatur Daerah

Aparatur Daerah merupakan Belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dari setiap unit kerja yang sifatnya (i) tidak menambah modal (ii) dampaknya dirasakan langsung oleh aparatur daerah.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp. 7.592.240.000,00. Alokasi terbesar berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang dialokasikan sebesar Rp. 4.805.429.500,00 atau secara proporsional sebesar 63,29 %. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang dialokasikan sebesar Rp. 2.180.833.500,00 merupakan pembayaran Panitia atau Tim Kegiatan yang akan dilaksanakan, dan Belanja lainnya merupakan penunjang secara langsung kegiatan yang akan dilaksanakan

BOP pada Aparatur Daerah dialokasikan sebesar Rp. 7.592.240.000,-

Belanja Modal pada kelompok Belanja Aparatur Daerah merupakan pembelian aset tetap yang dipergunakan secara langsung oleh Aparatur Daerah. Tahun 2003 Belanja Modal ini dialokasikan sebesar Rp. 13.268.315.000,00.

Belanja Modal pada kelompok Aparatur dialokasikan sebesar Rp. 13.268.315.000,00

BELANJA PELAYANAN PUBLIK

Pengelompokkan Belanja Pelayanan Publik ini ditujukan untuk penyediaan kebutuhan – kebutuhan yang bersifat wajib (rutin) maupun kegiatan – kegiatan yang dampak dan outputnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Begitu juga untuk pengalokasiannya, beberapa unit kerja yang masuk kedalam kelompok Belanja Pelayanan Publik yakni : DPRD, RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Catatan Sipil.

Batasan Belanja Pelayanan Publik

Tahun 2003 Kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 267.355.030.500,00 atau secara

Secara proposional Belanja Pelayanan Publik

proporsional bila dibandingkan dengan total belanja sebesar 72,75 %.

sebesar 72,75 % dari total Belanja

Secara rinci alokasi Belanja Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini :

TABEL 8
ALOKASI BELANJA PELAYANAN PUBLIK

Uraian Belanja	2003
A. Belanja Administrasi Umum	<u>175.197.586.000</u>
1. Belanja Pegawai / Personalia	166.022.209.000
2. Belanja Barang dan Jasa	5.852.267.000
3. Belanja Perjalanan Dinas	1.614.577.000
4. Belanja Pemeliharaan	1.708.533.000
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	<u>23.540.602.000</u>
1. Belanja Pegawai / Personalia	691.600.000
2. Belanja Barang dan Jasa	9.897.401.000
3. Belanja Perjalanan Dinas	279.012.000
4. Belanja Pemeliharaan	12.672.589.000
C. Belanja Modal	<u>25.497.570.000</u>
D. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	<u>31.119.272.500</u>
E. Belanja Tidak Tersangka	<u>2.000.000.000</u>
Jumlah	257.355.030.500

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Pelayanan Publik ini merupakan belanja wajib (rutin) yang secara tidak langsung berkaitan dengan program dan kegiatan dari unit kerja. Secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 175.197.586.000,00 yang sebagian besar merupakan alokasi untuk Belanja Pegawai / gaji PNS untuk Para Tenaga Pendidik, Tenaga Medis dan Tenaga Pelayanan Perijinan serta Tenaga Kebersihan. Belanja Pegawai masih mendominasi pada kelompok belanja ini yakni dialokasikan sebesar Rp. 166.022.209.000,00 atau secara proporsional sebesar 94,76 %.

BAU pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 175.197.586.000,00

Belanja Operasi dan Pemeliharaan merupakan belanja

BOP pada kelompok

langsung yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang tidak menambah aset tetap. Pada kelompok ini secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 23.540.602.000,00, Belanja terbesar dari kelompok ini berasal dari Belanja Pemeliharaan yang dialokasikan sebesar Rp. 12.672.589.000,00 yang diperuntukkan untuk pemeliharaan gedung sekolah, rehabilitasi Puskesmas dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar 9.897.401.000,00. Dari Belanja Pegawai dialokasikan sebesar 691.600.000,00 yang merupakan penunjang untuk pembayaran Tim / Panitia Kegiatan. Perjalanan Dinas dialokasikan sebesar Rp. 279.012.000,00.

Belanja Pelayanan Publik di alokasikan -sebesar Rp. 23.540.602.000,00

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 25.497.570.000,- yang merupakan merupakan belanj aset tetap yang secara langsung dirasakan untuk kepentingan masyarakat dan guna pelayanan.

Belanja Modal pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 25.497.570.000,00

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 31.119.272.500,00. Belanja ini berfungsi untuk memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk mengembangkan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing baik melalui organisasi keprofesian, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya. Melalui skeme Belanja ini juga dialokasikan pembiayaan untuk pembangunan masyarakat desa yang berfungsi untuk menumbuhkan perekonomian di pedesaan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 31.119.272.500,00

Belanja Tidak Tersangka dialokasikan sebesar

Pengeluaran Tidak Ter-

Rp. 2.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

sangka dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000.000

BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH

KONDISI UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD Tahun 2003 sebagaimana penjelasan bab diatas, menggunakan sistem anggaran kinerja sehingga menyebabkan anggaran pada periode tertentu harus mengalami surplus atau defisit. Struktur ini berbeda dengan struktur sebelumnya yang menganut anggaran berimbang dinamis. Dengan kondisi suatu anggaran yang surplus atau defisit tersebut maka Pembiayaan sangat mutlak diperlukan dengan melalui kebijakan keuangan.

Pembiayaan Daerah mutlak diperlukan sebagai implikasi anggaran surplus / defisit

Didalam unsur Pembiayaan Daerah terdapat 2 komponen yakni (i) Penerimaan Daerah dan, (ii) Pengeluaran Daerah.

Penerimaan Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu (ii) Transfer dari Dana Cadangan (iii) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi dan (iv) Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan.

Unsur Penerimaan Daerah dalam pembiayaan

Sedangkan Pengeluaran Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Transfer ke Dana Cadangan (ii) Penyertaan Modal (iii) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo (iv) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

Unsur Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagai upaya menjaga kesinambungan anggaran saat ini maupun dimasa mendatang, perlu adanya pencapaian efesiensi dan efektifitas belanja sekaligus mendorong

Upaya menjaga kesinambungan anggaran

pencapaian realisasi pendapatan daerah. hal ini mutlak diperlukan guna dilakukan kebijakan anggaran yang lebih berorientasi pada pendanaan secara intern tanpa dibebani melalui Pinjaman, mengeluarkan Obligasi maupun penjualan asset yang dipisahkan guna menutup defisit andai itu terjadi dimasa mendatang.

Untuk itu arah dan kebijakan umum pembiayaan daerah dilakukan melalui :

Arah dan kebijakan pembiayaan

1. Surplus/Defisit akan dilakukan kebijakan yang lebih menfokuskan pada pembiayaan intern guna menghindari beban yang berkelanjutan dimasa mendatang.
2. Perlu dilakukan pemberdayaan pembiayaan daerah dalam rangka menjaga kesinambungan anggaran dimasa mendatang melalui Penyertaan Modal maupun melakukan Pencadangan.
3. Melaksanakan kewajiban pembayaran Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Melakukan pembiayaan intern

Pemberdayaan pembiayaan

Melaksanakan kewajiban daerah

STRATEGI PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan kondisi Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi, dimana Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 346.125.023.600,00, sedangkan Belanja Daerah diperkirakan membutuhkan alokasi sebesar Rp. 353.711.732.500,00 maka terdapat **defisit anggaran** yang terjadi sebesar Rp. 7.586.708.900,00.

Desifit RAPBD 2003 sebesar Rp7.586.708.900

Adapun rincian Pembiayaan dan unsur-unsurnya dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini :

TABEL 9
Pembiayaan Daerah Tahun 2003

Uraian Pembiayaan	2003
A. Penerimaan Daerah	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	26.200.000.000
b. Transfer dari Dana cadangan	0
c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0
d. Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan	0
Jumlah Penerimaan Daerah	<u>26.200.000.000</u>
B. Pengeluaran Daerah	
a. Transfer ke Dana Cadangan	15.000.000.000
b. Penyertaan Modal	3.500.000.000
c. Pembayaran Utang Pokok yg jatuh tempo	41.583.200
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	71.707.900
Jumlah Pengeluaran Daerah	<u>18.613.291.100</u>
Jumlah Pembiayaan	<u>7.586.708.900</u>

Penerimaan Daerah

Desifit sebesar Rp. 7.586.708.900,00 yang terjadi akan dibiayai melalui Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang diproyeksikan sebesar Rp. 26.200.000.000,00. Dengan alokasi tersebut maka pada sisi pembiayaan masih terdapat selisih sebesar Rp. 18.613.291.100,00.

Defisit akan ditutup melalui SILPA sebesar Rp. 26.200.000.000,00

Pengeluaran Daerah

Masih adanya selisih lebih sebesar Rp. 18.613.291.100,00, hal tersebut harus dilakukan kebijakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk :

Masih adanya selisih lebih pembiayaan sebesar Rp. 18.613.291.100,00

1. Pengalokasian ke Dana Cadangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Lamongan maka pada Tahun Anggaran 2003 dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00
- Dana Cadangan dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00*
2. Dalam rangka pemberdayaan pembiayaan yang terjadi maka kebijakan keuangan dilakukan dengan melalui Penyertaan Modal sebesar Rp. 3.500.000.000,00 yakni kepada :
- Penyertaan Modal dialokasikan sebesar Rp. 3.500.000.000,00*
- a. Penyertaan Modal kepada Bank Pasar sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Penambahan modal tersebut guna mencukupi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 20 % dan ditindaklanjuti melalui Perda Nomor 09 Tahun 2001 tentang Tambahan Modal untuk PD Bank Pasar Lamongan.
 - b. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Jatim dimana Tahun 2002 mampu membukukan labanya dan di tahun 2003 memiliki kontribusi kepada PAD, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan Penyertaan Modal kepada PT Bank Jatim sebesar Rp. 500.000.000,00
 - c. Penyertaan Modal kepada PD Aneka Usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,00 karena memperhatikan kinerja PD. Aneka Usaha yang menunjukkan peningkatan, sehingga perlu dilakukan pengembangan usaha.

-
3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp. 41.583.200,00. yang merupakan pembayaran utang pokok untuk pembangunan sarana dan prasarana perkampungan pada 8 Kelurahan Tahun 1994/1995 sebesar Rp. 174.123.600,00 dan Pinjaman untuk pembangunan sarana dan prasarana Pasar Blimbing Kecamatan Paciran Tahun 1999/2000 sebesar Rp. 262.500.000,00
- Pembayaran Utang Pokok dialokasikan sebesar Rp. 41.583.200,00*
5. Dialokasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp. 71.707.900,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berjalan dialokasikan sebesar Rp. 71.707.900,00.*

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Di dalam Rencana Strategis Kabupaten Lamongan Tahun 2002 – 2006 telah diamanatkan bahwa tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan keuangan daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengoptimalkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan memanfaatkan terbukanya pasar global, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah
2. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah
3. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah
4. Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha

Sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan amanat Rencana Strategis Kabupaten Lamongan

5. Menerapkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia
7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi
8. Memanfaatkan terbukanya pasar global
9. Memanfaatkan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka pada Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berbagai kegiatan dan upaya telah dilakukan disamping penataan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah, penataan personil/pegawai, penataan keuangan daerah dengan melalui optimalisasi penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, maka dalam pemantapan pelaksanaan otonomi daerah. Tahun Anggaran 2003 kegiatan Pokok Program ini adalah melalui (1) Pembinaan Politik Daerah (2) Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Otoda.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penataan dan kebijakan pemerintah, berbangsa, bernegara dan berpolitik, HAM serta hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten dengan organisasi masyarakat, politik, kepemudaan dan organisasi lainnya

<i>Program Pelaksanaan Daerah</i>	<i>Pemantapan Otonomi</i>
---	-------------------------------

2. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah

*Program Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
Pemerintah*

Salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya dukungan sumber daya manusia aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memiliki pegawai sebanyak 11.716 orang terdiri dari 11.414 orang Pegawai Negeri Sipil dan 802 orang tenaga kontrak. Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional tersebut melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur baik pendidikan struktural maupun pendidikan fungsional. Dengan kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (2) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kebudayaan (3) Pendidikan Kedinasan.

Program ini dimaksudkan untuk terpenuhinya standart pendidikan struktural sesuai dengan persyaratan peningkatan profesional Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Tupoksi.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

*Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas kondisi sarana dan prasarana pemerintah yang memadai. Hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam melakukan aktivitas baik dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan yang teraktualisasi dalam pelayanan publik.

Terhadap kondisi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan khususnya penyediaan gedung perkantoran yang ada dan fasilitas pendukung yang lain dirasa kurang memadai, sehingga memungkinkan terwujudnya pelayanan masyarakat yang semakin meningkat.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dimaksudkan untuk tersedianya gedung, sarana transportasi, perlengkapan rumah dinas, peralatan kantor yang representatif dan penyediaan tanah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

4. Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan sebagai daerah otonomi didalam melakukan berbagai aktivitas baik penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan telah didukung oleh berbagai sumber dana salah satu diantaranya Pendapatan Asli Daerah.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan dan Pengelolaan Produk/Obyek Wisata (2) Penerimaan Pendapatan Daerah (3) Penyertaan Modal Pemerintah (4) Pengembangan Penanaman Modal

Adapun tujuan dari program ini :

- a. Terciptanya daya tarik obyek wisata
- b. Tersedianya data wajib pajak PBB
- c. Terwujudnya perusahaan daerah yang kredible dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta, serta terwujudnya informasi peluang investasi yang feasible.

*Program Pengelolaan
sumber-sumber
pendapatan daerah*

5. Pembinaan Kekayaan Daerah dan Perusahaan-Perusahaan Daerah

Program Pembinaan Kekayaan Daerah dan Perusahaan Daerah

Investasi memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, investasi yang dilaksanakan pemerintah terutama untuk mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Pengembangan kebijakan pengelolaan BUMD secara transparan, selektif, efisien dan profesional adalah dalam rangka menopang kemandirian daerah serta meningkatkan dan mengembangkan struktur ekonomi daerah.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Lembaga Keuangan (2) Pembinaan Kekayaan Daerah (3) Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Daerah.

Adapun tujuannya adalah Terwujudnya sistem informasi pengelolaan APBD dan keuangan daerah sesuai dengan dengan anggaran kinerja.

6. Pembangunan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Industri dan Kelautan

Program Pembangunan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Industri dan Kelautan

Kabupaten Lamongan adalah daerah pemasok pangan nomor 3 di Jawa Timur, melihat kondisi geografis Kabupaten Lamongan memang sebagian besar wilayahnya sangat cocok untuk lahan pertanian. Hasil-hasil pertanian begitu melimpah baik pertanian tanaman pangan, hasil perkebunan rakyat, perikanan laut dan darat, peternakan maupun hasil hutan. Dalam perkembangan

dari tahun ke tahun nampaknya masyarakat masih bertahan sebagai petani murni, dalam arti bahwa para petani masih mendominasi sebagai pengolah lahan menjadi produk bahan mentah. Kalau kondisi seperti ini bisa dikembangkan menjadi pengelola bahan jadi (bahan mentah dikelola menjadi bahan jadi atau setengah jadi) maka akan sangat berdampak pada terbukanya peluang lapangan kerja, untuk itu keterlibatan pemerintah, dunia usaha sangat diperlukan.

Keberadaan industri kecil di Kabupaten Lamongan juga sangat banyak, para pengarajin, penenun, pemahat, aneka usaha gerabah dan sebagainya adalah para pengembang industri rumah tangga yang ulet, hal tersebut tampak dari usaha yang mereka tekuni sebagian besar adalah dari hasil turun temurun. Menurut data statistik jumlah industri kecil di Kabupaten Lamongan sebanyak 23.680 unit, suatu jumlah yang tidak kecil.

Permasalahan klasik yang selalu mencul adalah masalah modal yang terbatas, sedikitnya tenaga ahli/profesional, dan sulitnya pemasaran. Apabila kita cermat terhadap ketiga masalah tersebut dan serius untuk memperdulikan dan mengembangkan produk-produk industri kecil daerah tersebut, maka disamping terbukanya lapangan kerja, daerah juga memiliki trade mark khusus yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kabupaten Lamongan juga memiliki potensi laut yang dapat di kembangkan menjadi pelabuhan setaraf internasional sebagai pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak yang saat ini telah sampai pada titik jenuh dan

sebagai pengembang Wilayah Surabaya Barat (GERBANGKERTOSUSILA)

Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah (2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (3) Pengembangan Pertanian Rakyat, Peternakan Rakyat dan Perikanan Terpadu (4) Pengembangan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (5) Penataan Strukur Industri (6) Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Hutan Rakyat (7) Diversifikasi Pangan dan Gizi (8) Pembangunan Pertambangan (9) Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Meningkatnya SDM, produktifitas dan pendapatan pengrajin Indutri Kecil di sentra-sentra industri.
- b. Tersedianya benih yang unggul sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani
- c. Tersedianya sapi bibit unggul, sehingga dapat meningkatkan produksi sapi dan pendapatan petani.

7. Pembangunan dan Pengembangan Infra Struktur

Dalam pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan tersebut harus memenuhi syarat keadilan dalam arti pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tidak

Program Pembangunan dan Pengembangan Infra Struktur

mengesampingkan unsur pertumbuhan untuk pengembangan suatu daerah. Dalam rangka untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan penyediaan pembangunan infra struktur merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang ekonomi sosial masyarakat termasuk upaya penanggulangan kemiskinan. Penyediaan pembangunan infra struktur mencakup sektor transportasi, pengairan, pengembangan pelayanan masyarakat, pembangunan prasarana perkotaan dan pembangunan desa.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Sumberdaya Air (2) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (3) Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya (4) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (6) Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan (7) Pembangunan Jalan dan Jembatan (8) Pengembangan Sistem Transportasi (9) Pembangunan dan Pengembangan Pelayanan Rakyat (10) Pembangunan Prasarana Perkotaan (11) Pembangunan Desa

Adapun tujuan program ini untuk :

- a. Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi.
- b. Tercapainya kondisi jalan yang mantap, sehingga memperpanjang umur teknis dan mengakibatkan lancarnya arus lalu lintas.
- c. Tersedianya data dan potensi desa.
- d. Meningkatnya SDM masyarakat khususnya di

pedesaan, sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat desa meningkat.

8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Pelaksanaan pembangunan secara umum memberi dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup, untuk mengantisipasi terhadap dampak negatif yang tertinggal akibat pelaksanaan dan hasil pembangunan tersebut Pemerintah Daerah telah berupaya untuk melakukan pencegahan dini terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai bidang, guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah serta meningkatkan perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah diarahkan dengan mempercepat pembangunan ekonomi yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

Berkaitan dengan arah tersebut, maka pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki sehingga diharapkan perkembangan daerah sesuai dengan kekuatan yang dimiliki dan secara bertahap akan memperkecil ketimpangan pembangunan.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Penataan Ruang (3) Pembinaan

*Program Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang*

Daerah Pantai (4) Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air
(5) Rehabilitasi Lahan Kritis (6) Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup.

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan terkendalinya kerusakan lahan.
- b. Tersusunnya arahan dan pedoman penataan ruang kota dan daerah strategis.

9. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemantapan Kehidupan Beragama

Operasionalisasi pembangunan yang bertumpu pada kekuatan -kekuatan masyarakat pada dasarnya merupakan pembangunan yang bersifat pengembangan kemampuan masyarakat serta pengguliran dari peran sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Konsekuensi dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan tersebut mengarah pada implementasi pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berarti mengarahkan keberdayaan masyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan spiritual.

Dalam mewujudkan pengembangan kehidupan beragama di Kabupaten Lamongan diarahkan pada tercapainya peningkatan keimanan, ketaqwaan, pengembangan iklim yang kondusif bagi kehidupan beragama serta peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan.

*Program Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemantapan Kehidupan
Beragama*

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama (2) Pembinaan Pendidikan Agama (3) Pembinaan Keluarga dan KB (4) Pemberdayaan Wanita dan PKK.

Adapun tujuan program ini adalah :

- a. Tersedianya tempat-tempat ibadah yang representatif, serta terwujudnya syiar agama.
- b. Terwujudnya keluarga kecil dan sejahtera
- c. Tingginya peranan wanita dalam pem-bangunan keluarga dan pembangunan daerah
- d. Semakin lancarnya pembinaan PKK di seluruh Kabupaten Lamongan

10. Pembinaan Tradisi dan Nilai-Nilai Budaya

Sebagai bangsa yang baik hanya yang bisa menghargai karya dan masa kejayaan pendahulunya, Kabupaten Lamongan memiliki banyak kekayaan budaya yang perlu untuk terus dibina dan dikembangkan sehingga kita mengerti tentang asal muasal dan kejayaan para leluhurnya.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pembinaan Kebahasaan, Kesusastraan dan Kepustakaan (2) Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (3) Pembinaan Kesenian (4) Pembinaan Tradisi Penggalan Sejarah dan Permusiuman (5) Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat (6) Pengembangan Sistem Informasi Geofogi/Geografi

*Program Pembinaan
Tradisi dan Nilai-Nilai
Budaya*

Adapun tujuan program ini adalah :

- a. Tersedianya sarana perpustakaan yang memadai
- b. Meluasnya bakat kesenian dan tersebarnya budaya Kabupaten Lamongan ke skala nasional maupun internasional
- c. Meningkatnya peranan organisasi sosial dan kemandirian Panti Asuhan
- d. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

11. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pengembangan Teknik Produksi

*Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
dan Pengembangan
Teknik Produksi*

Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat sebagai akibat dari semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat serta memudahnya memperoleh informasi dari berbagai bidang, maka upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam peningkatan pelayanan publik memperoleh perhatian serius khususnya pada pengembangan teknik produksi.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Listrik Pedesaan (2) Sistem Manajemen administrasi Kependudukan (3) Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan Rakyat (4) Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (5) Penerapan dan Pengembangan Teknik Produksi

Adapun tujuan program ini adalah :

- a. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik di pedesaan
- b. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan Akta Catatan Sipil
- c. Semakin sempurnahnya sistem aplikasi SIMDUK
- d. Tercapainya kondisi mantap, aman berlalu lintas

- e. Tersedianya SIM Jalan bagi keperluan perencanaan
- f. Berkembang dan meningkatnya teknologi sederhana untuk produksi pertanian

12. Penelitian dan Pengkajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengembangan dan penguasaan serta pemanfaatan IPTEK dalam upaya mencapai kemajuan pada suatu daerah mutlak sangat diperlukan, mengingat pengembangan dan penguasaan serta pemanfaatan IPTEK adalah merupakan suatu upaya untuk mengejar ketertinggalan daerah dengan daerah lain yang dipandang lebih maju.

Berbagai hasil penelitian dan pengkajian dari berbagai bidang yang telah dilakukan baik oleh Perguruan Tinggi maupun lembaga lain yang menaruh perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan daerah sangat diperlukan sebagai pendukung perencanaan pembangunan di daerah. Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Daerah Tingkat II (2) Perencanaan Pembangunan Daerah (3) Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar dan Terapan (4) Penelitian Pendukung Perencanaan Pembangunan (5) Penelitian dan pengkajian Kebijakan

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Terpadunya usulan dan kebutuhan program pembangunan di wilayah pedesaan dengan usulan program Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Kabupaten Lamongan

Program Penelitian dan Pengkajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

- b. Tersusunnya program pembangunan tahunan kabupaten lamongan berdasarkan renstra kabupaten
- c. Tersusunnya suatu pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bupati selama 1 (satu) tahun anggaran
- d. Terwujudnya strategi pembangunan dan pengelolaan makro ekonomi industri agribisnis
- e. Tersedianya data dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan Gerakan pengentasan kemiskinan
- f. Tersedianya peta dasar, guna menunjang perencanaan pembangunan
- g. Tersedianya data dan potensi kawasan tertinggal

13. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

*Program Peningkatan
Pendidikan dan Pelatihan*

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam mempersiapkan dan membentuk generasi muda yang berkualitas serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sarana pengembangan kehidupan lainnya yang terjadi saat ini dan kemungkinannya dimasa mendatang.

Dengan demikian, kualitas pendidikan menjadi persoalan yang sangat penting untuk ditangani, menyangkut berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti fasilitas, guru, peserta didik, kurikulum, manajemen dan keterlibatan seluruh komponen yang terlibat dalam pendidikan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pembinaan Pendidikan Dasar (2) Pembinaan Pendidikan Menengah (3) Operasi dan

Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan (4)
Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan.

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Terpenuhinya standart pelayanan pendidikan dasar dan menengah
- b. Terwujudnya generasi muda yang mandiri dan sehat jasmani dan rohani
- c. Bangkit dan orbitnya kelompok olahraga yang ada di Kabupaten Lamongan
- d. Tersedianya fasilitas olahraga yang cukup dan memadai bagi kebutuhan keolahragaan masyarakat

14. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Sosial

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan Pembangunan Nasional

Sebagaimana tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) bahwa tujuan Pembangunan Bidang Kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (3) Pelayanan Rujukan dan pengobatan Tradisional (4) Pelayanan Kesehatan Masyarakat (5) Operasi dan perawatan

*Program Peningkatan
Derajat Kesehatan dan
Sosial*

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (6) Pengawasan Obat dan Makanan (7) Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah sakit (8) Pembinaan Pengobatan Tradisional (9) Penyehatan Lingkungan Permukiman (10) Perbaikan Perumahan dan Permukiman (11) Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan (12) Penyediaan dan pengelolaan Sarana Air Bersih (13) Penanggulangan Bencana Alam (14) Pembinaan Kesejahteraan Sosial (15) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (16) Pembinaan anak dan Remaja

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Tingginya pemahaman bagi semua lapisan masyarakat akan penggunaan garam beryodium, bagi balita dan ibu hamil
- b. Diketahui dan tertanggulangnya prevalensi anemia gizi pada Ibu hamil, wanita dan remaja putri
- c. Meningkatnya derajat kesehatan anak pra sekolah
- d. Tingginya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan BTM dan bahaya narkoba
- e. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
- f. Tercapainya pengkajian perilaku hidup bersih dan sehat
- g. Tercapainya optimalisasi pelaksanaan Posyandu
- h. Terpenuhinya kebutuhan vaksin HB vial dan untuk menambah alokasi lemari es di puskesmas
- i. Terpenuhinya kebutuhan imunisasi bagi anak usia sekolah
- j. Tercegah dan tertanggulangnya penderita penyakit menular

- k. Terpenuhiya Gedung Puskesmas yang memenuhi standat pelayanan minimal
- l. Peningkatan derajat kesehatan puskesmas
- m. Tereadinya peralatan kedokteran yang minimal guna peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- n. Tercapainya strata Puskesmas yang optimal dan berkualitas
- o. Tingginya pengetahuan tentang pengelolaan obat secara profesional
- p. Terpenuhiya kebutuhan obat di Rumah Sakit dan Puskesmas serta pemerataan distribusi obat
- q. Terpenuhiya kebutuhan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dan tersedianya pelayanan medis untuk pelayanan kesehatan masyarakat
- r. Terpenuhiya standart pelayanan rumah sakit
- s. Meningkatnya derajat kebersihan dan keindahan lingkungan permukiman
- t. Terpenuhiya kebutuhan air bersih bagi masyarakat, baik di kota maupun di desa
- u. Ringannya beban moril dan materiil bagi korban bencana alam
- v. Meningkatnya ketrampilan dan kesejahteraan anak bermasalah, gepeng dan para WTS serta para penyandang cacat.
- w. Semakin aktifnya kegiatan karang taruna dan SDM generasi muda.

15. Pendayagunaan Sistem dan Pengawasan

Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat sebagai akibat dari semakin tingginya tingkat

*Program Pendayagunaan
Sistem dan Pengawasan*

pendidikan masyarakat serta mudahnya memperoleh informasi di berbagai bidang, maka upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana pemerintah yang memadai, serta penataan kelembagaan perangkat daerah.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Peningkatan Efisiensi dan pendayagunaan aparatur (2) Pendayagunaan Sistem Pengawasan (3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan.

Adapun tujuan dari program ini adalah .

- a. Terwujudnya standart pelayanan minimal dan pelayanan publik seta tersusunnya akuntabilitas kinerja pemerintah.
- b. Tersedianya data pengembangan aplikasi SIMDA

16. Pembinaan dan Pengembangan Usaha-Usaha Ekonomi

Kesadaran keperasi, pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan dirasakan perlu adanya pembinaan dan pengembangan secara terus menerus sehingga diharapkan dapat mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya dalam mengakses pangsa pasar. Untuk itu yang perlu harus dilakukan adalah melalui pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah agar dapat bersaing dalam hal peningkatan struktur permodalan, kualitas, kuantitas dan kontinyuitas produksi

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-Usaha Ekonomi

sehingga memiliki akses terhadap pasar, disamping mampu membuka aksesibilitas terhadap kesempatan kerja dan berusaha melalui keunggulan kompetitif terutama yang berbasis pada sumber daya alam.

Terhadap pengembangan usaha dan lembaga perdagangan di dalam upaya memasarkan produk-produk perdagangan khususnya bagi usaha yang berbasis bahan baku lokal, produk unggulan daerah, dilakukan melalui pemanfaatan arus informasi pasar dalam dan luar negeri serta melalui peningkatan pemanfaatan kebijakan perdagangan, pengusaha masuk desa dan pengembangan pasar desa.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 adalah melalui (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (2) Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan (3) Pembinaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah (4) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Meningkatnya tingkat kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola dan menyetatkan koperasi, serta meningkatnya volume usaha kecil dan menengah.
- b. Diketuainya hasil produksi usaha kecil menengah di Kabupaten Lamongan
- c. Terciptanya iklim usaha yang kondusif sehingga persaingan perdagangan dapat berjalan dengan terbuka
- d. Adanya informasi harga pasar yang jelas dan akurat.
- e. Tersedianya informasi tentang karakteristik, komposisi dan distribusi usaha kecil dan menengah

17. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

*Program Pembinaan
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat*

Kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil mendorong terjadinya kriminalitas dan provokasi, apalagi penyelesaian krisis ekonomi tidak kunjung berakhir. Pada sisi lain kesadaran bela negara serta pemahaman terhadap masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat masih sangat rendah. Tanggung jawab keamanan ketentraman dan ketertiban masih dibebankan sepenuhnya pada pemerintah yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi semacam ini sangat menghambat implementasi sistem keamanan rakyat semesta dan swakarsa.

Krisis ekonomi berdampak terjadinya krisis lain (multi dimensi) termasuk diantaranya krisis di bidang hukum. Krisis pada bidang hukum ditandai dengan adanya tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan baik yang bersifat vertikal maupun horisontal sehingga memicu tindakan kekerasan dari pemerintah maupun masyarakat, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum dan institusi-institusi formal hukum.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Penerapan dan Penegakkan Hukum (2) Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Hukum di Daerah (3) Pembinaan Kekuatan Rakyat (4) Kewilayahan

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Tertibnya pelaksanaan Perda di Kabupaten Lamongan
- b. Tingginya kewibawaan Pemerintah Kabupaten Lamongan

- c. Adanya sistem jaringan informasi dokumentasi produk hukum di Kabupaten Lamongan
- d. Meningkatnya kinerja SDM Polisi PP

18. Pembinaan Pengembangan Produktivitas dan Kesempatan Kerja

*Program Pembinaan
Pengembangan
Produktivitas dan
Kesempatan Kerja*

Hasil produksi dari berbagai macam produk yang ada di daerah baik dari hasil industri kecil (home industri), hasil pertanian, horti kultura, hasil perkebunan rakyat serta hasil hutan secara kualitas masih perlu terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang menjadi produk yang memiliki standart kualitas. Kesiapan tenaga trampil, kesediaan tenaga kerja yang mau menggeluti terhadap produk-produk lokal, kerja keras, ulet, tidak cepat merasa puas dengan produk yang dihasilkan, beradaptasi dengan kemajuan teknologi adalah merupakan syarat yang harus dilakukan oleh setiap produsen.

Produksi yang memiliki kualitas jumlahnya sangat terbatas juga terhadap produk yang dihasilkan secara kuantitas masih sangat kurang mencukupi. Untuk itu di dalam mencukupi ketersediaan produk lokal yang memiliki kualitas dan memenuhi kuantitas produksi serta adanya ketersediaan produk dalam berbagai waktu maka perlu adanya bapak angkat perusahaan yang dapat mengakomodir terhadap beberapa produk hasil home industri daerah. Dengan demikian maka terbukanya kesempatan kerja pada setiap lini kegiatan ekonomi betul-betul dapat terwujud.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pelatihan dan Peningkatan

Ketrampilan Tenaga Kerja (2) Pembinaan Hubungan Industri dan Perlindungan Tenaga Kerja (3) Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Trampilnya masyarakat usia kerja
- b. Mampunya bersaing dengan tenaga kerja luar daerah
- c. Harmonisnya hubungan antara pekerja dan pengusaha
- d. Mampu dan bijaksananya dalam penanganan masalah ketenagakerjaan yang terjadi
- e. Diketuinya secara luas Upah minimal Kabupaten Lamongan

19. Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi

Setiap produsen memang diharapkan bisa ajek dan secara kontinyu dapat terus menerus bisa menyediakan produksi yang dihasilkan. Ketersediaan produk secara kontinyu dalam berbagai waktu yang tidak terkait pada ketersediaan bahan baku yang tergantung pada musim dan hasil panen tertentu sangat diharapkan oleh konsumen. Dalam mensikapi terhadap hal tersebut diperlukan adanya kerjasama perdagangan dan sistem distribusi agar ketersediaan produksi setiap saat dapat terjaga dengan baik.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi (2) Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Tersedianya fasilitas pasar daerah yang representativ
- b. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

*Program Pengembangan
Perdagangan dan Sistem
Distribusi*

- c. Semakin lancarnya arus perputaran uang di lokasi pasar
- d. Dikenalnya potensi dan produksi Kabupaten Lamongan di tingkat nasional maupun internasional

20. Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi

Menyikapi terhadap perkembangan yang ada di tengah – tengah masyarakat akan tuntutan terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi yang memadai sebagai wujud dalam mengakses terhadap percepatan informasi yang valid dan tepat waktu. Hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus segera terpenuhi karena peranannya sangat menentukan terhadap keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik sekaligus bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Kegiatan Pokok Program ini pada Tahun Anggaran 2003 antara lain meliputi (1) Pengembangan Operasi Penerangan (2) Pembinaan dan Pengembangan Pers di Daerah (3) Pengembangan Sistem Informasi (4) Pengembangan Radio, Televisi dan Flim

Adapun tujuan dari program ini adalah :

- a. Terciptanya komunikasi yang harmonis antara Pemkab, Pers dan masyarakat
- b. Terciptanya informasi kondisi dan potensi daerah secara lebih detail dan jelas
- c. Tersedianya materi dan acuan sebagai bahan para pengambil kebijakan pemerintah Kabupaten

- d. Tersedianya informasi yang tepat dan akurat dari Pemerintah Kabupaten
- e. Tersedianya informasi yang tepat, akurat dan resmi Pemerintah Kabupaten di daerah terpencil
- f. Terwujudnya kelompok komunikasi yang mantap dan terorganisasi dengan baik
- g. Tersedianya sarana informasi dan promosi baik secara visual maupun peragaan
- h. Lancarnya jalur komunikasi antara Pemerintah pusat, daerah dan kecamatan
- i. Terlaksananya sistem administrasi secara terpadu bidang pelayanan kesehatan, kepegawaian, kependudukan serta jalur surat menyurat
- j. Cepatnya jalur informasi dan komunikasi antara pejabat, dinas, dan wilayah
- k. Cepat dan akuratnya pelayanan kepada masyarakat
- l. Tersedianya sarana penyiaran media radio yang memenuhi standar.

BAB VI

PENUTUP

Dengan melihat perkembangan serta dinamika aspirasi masyarakat yang kian berkembang, sangat jelas bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2003 disusun berdasarkan kondisi-kondisi nyata yang ada dalam masyarakat dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Lamongan

Disamping itu perlu disadari bahwa Rancangan APBD Tahun 2003 merupakan proses kesinambungan dan kelanjutan dari APBD tahun-tahun sebelumnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Lamongan.

RAPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2003 secara garis besar menganut sistem anggaran kinerja dengan komposisi sebagai berikut : (i) Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 346.125.023.600,00, (ii) Belanja Daerah diperkirakan membutuhkan alokasi sebesar Rp. 353.711.732.500,00 sehingga terjadi (iii) defisit anggaran sebesar Rp. 7.586.708.900,00

Desifat tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan pembiayaan dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu sebesar Rp. 26.200.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih dari penerimaan daerah sebesar Rp. 18.613.291.100,00 yang dialokasikan kedalam Pengeluaran Daerah yakni : (i) Dana Cadangan dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (ii) Penyertaan Modal

RAPBD merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan

Garis besar RAPBD 2003

Garis besar kebijakan pembiayaan tahun 2003

dialokasikan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (iii) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp. 41.583.200,00 dan (iv) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp. 71.707.900,00